

## **Pancasila Sebagai Landasan Politik Luar Negeri Indonesia Di Tengah Sistem Internasional Multipolar**

Fernanda Dewa Ariansyah<sup>1</sup>

Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta

Email: 151200087@student.upnyk.ac.id

### **ABSTRAK**

Sistem internasional multipolar yang ditandai dengan munculnya banyak kekuatan berpotensi menimbulkan beragam isu internasional sekaligus peluang kerja sama multilateral. Negara membutuhkan suatu landasan fundamental dalam menentukan sikap dan tindakan di tengah perubahan konstelasi global tersebut untuk dapat beradaptasi dan mencapai tujuan nasionalnya. Pancasila sebagai dasar negara Indonesia berfungsi sebagai landasan fundamental dalam setiap sikap dan tindakan yang dilakukan Indonesia, termasuk politik luar negeri. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Pancasila dalam memandu politik luar negeri Indonesia di tengah sistem internasional multipolar. Penelitian ini berangkat dari kerangka pemikiran Pancasila sebagai dasar negara Indonesia dan konsep sistem multipolar. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pengumpulan data sekunder dari studi kepustakaan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Pancasila masih dijadikan pedoman dalam politik luar negeri Indonesia di tengah sistem internasional multipolar. Nilai-nilai fundamental Pancasila mendorong komitmen politik luar negeri bebas aktif Indonesia untuk menjadi aktor utama di kancah global dengan mempromosikan perdamaian dunia, menghubungkan negara berkembang dengan subjek internasional lain, dan mendukung agenda global dalam *Sustainable Development Goals* (SDGs).

**Kata kunci:** Pancasila, Politik Luar Negeri Indonesia, Sistem Internasional Multipolar.

### **ABSTRACT**

*A multipolar international system characterized by the emergence of many powers has the potential to inflict various international issues as well as opportunities for multilateral cooperation. The country needs a fundamental basis for determining attitudes and actions amid changes in the global constellation to adapt and achieve its national goals. Pancasila as the basis of the Indonesian state functions as a fundamental basis for every attitude and action taken by Indonesia, including foreign politic. This research aims to analyze the role of Pancasila in guiding Indonesia's foreign politic amid multipolar international system. This research departs from the framework of Pancasila as the basis of the Indonesian state and the concept of a multipolar system. This research uses qualitative research methods with secondary data collection from literature studies. The results of this research show that Pancasila is still used as a guideline in Indonesian foreign politic in the midst of multipolar international system. The fundamental values of Pancasila encourage Indonesia's free and active foreign politic commitment to become a major actor on the global stage by promoting world peace, connecting developing countries with other international subjects, and supporting the global agenda in the *Sustainable Development Goals* (SDGs).*

**Keywords:** Pancasila, *Indonesia's Foreign Politic, Multipolar International System.*

## PENDAHULUAN

Setiap negara di dunia ini berdiri berlandaskan suatu nilai atau ideologi yang dipercayai sebagai cerminan kebiasaan atau jati diri negara tersebut. Ideologi menjadi pedoman suatu negara dalam bertindak dan bersikap untuk mencapai cita-cita dan tujuan nasionalnya (Rodee, 1957). Di Indonesia, Pancasila ditetapkan sebagai ideologi sekaligus dasar negara yang menjadi panduan dalam setiap kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila sendiri berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu “panca” yang berarti lima dan “sila” yang berarti prinsip, sehingga Pancasila bisa diartikan sebagai lima prinsip. Sebagai ideologi, Pancasila memuat tujuan luhur bangsa Indonesia dan upaya apa yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut. Sebagai hasil dari buah pikiran pendiri bangsa dalam mempersiapkan negara yang merdeka dan berdaulat, Pancasila memuat filosofi dan nilai luhur bangsa Indonesia yang identik dengan gotong royong dan toleransi. Nilai dan filosofi Pancasila ini nantinya akan mengatur jalannya pemerintahan sekaligus memberi legitimasi dalam setiap kebijakan yang diambil pemerintah untuk mengatur negaranya.

Pancasila selain sebagai ideologi juga berkedudukan sebagai dasar negara Indonesia. Artinya, Pancasila merupakan dasar negara dalam mengatur dan menyelenggarakan pemerintahan. Setiap kebijakan yang dibuat dan dirumuskan oleh pemerintah didasarkan pada nilai-

nilai Pancasila. Meskipun nilai-nilai Pancasila tidak memuat tujuan spesifik yang mendasari dibuatnya suatu kebijakan, nilai-nilai tersebut menjadi landasan fundamental agar setiap kebijakan yang dibuat tidak melenceng dari ideologi dan tujuan bangsa. Maka, dalam setiap kebijakan yang dibuat pemerintah harus memperhatikan prinsip kemanusiaan dan keadilan sosial secara inklusif yang diperjuangkan melalui musyawarah mufakat. Kebijakan yang dimaksud meliputi seluruh kebijakan domestik termasuk kebijakan di bawah pemerintah pusat, seperti peraturan daerah dan peraturan desa. Selain kebijakan domestik, Pancasila juga menjadi acuan politik luar negeri Indonesia dalam memberikan sikap dan tindakan di lingkup global.

Politik luar negeri adalah seperangkat nilai, sikap, arah dan sasaran yang menjadi pedoman dalam melakukan tindakan dan merespon isu-isu internasional (Yani, n.d.). Arah politik luar negeri Indonesia didasarkan pada Pancasila dan UUD 1945. Lebih lanjut, arah politik luar negeri Indonesia tertuang dalam UU No. 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri, dimana Indonesia menerapkan politik luar negeri “bebas aktif”. Bebas yang dimaksud dengan UU ini bukanlah sikap yang netral, melainkan kebebasan dalam bersikap dan bertindak terhadap isu internasional dan tidak mengikatkan diri kepada suatu kekuatan dunia. Sedangkan

aktif menurut UU ini adalah Indonesia terlibat secara aktif dalam mencapai perdamaian dunia, dengan ikut menyelesaikan konflik, sengketa, dan berbagai isu lainnya melalui pemikiran, pengalaman, maupun bantuan fisik (UU Nomor 37, 1999). Hal ini sesuai dengan tujuan Indonesia yang tertuang dalam pembukaan UUD 1945 alinea IV, dimana Indonesia turut aktif dalam melaksanakan ketertiban dunia yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila, yaitu kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Implementasi politik luar negeri bebas aktif yang dilakukan Indonesia ini sudah terlihat dari awal kemerdekaan. Pada era orde lama, Indonesia menjadi aktor yang proaktif dalam mewujudkan stabilitas dan perdamaian dunia dengan menjadi salah satu dari lima pendiri *Association of Southeast Asian Nations* (ASEAN) serta menginisiasi berdirinya Gerakan Non-Blok (GNB) (Abdurofiq. et al., 2024, h. 9). Lalu pada orde baru, Indonesia mengubah politik luar negeri menjadi lebih kompromi dengan bergabung kembali menjadi anggota Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tahun 1966, yang sebelumnya sempat keluar pada kepemimpinan Soekarno tahun 1965 (Sukma, 1995, h. 311). Nilai-nilai Pancasila dalam mempengaruhi arah politik luar negeri Indonesia masih berlangsung hingga era reformasi dimana sistem internasional telah mengalami perubahan.

Memasuki masa reformasi, politik luar negeri Indonesia telah beradaptasi seiring terjadinya perubahan dalam sistem internasional. Kondisi internasional yang sebelumnya bersifat bipolar

selama perang dingin berubah menjadi multipolar setelah berakhirnya perang dingin. Multipolar merupakan suatu kondisi dimana terdapat lebih dari dua kekuatan besar atau lebih dari dua kutub dalam sistem internasional. Pada awalnya, sistem multipolar belum terlihat dalam aspek militer, dimana Amerika Serikat dan Rusia masih menjadi dua kekuatan besar. Sebaliknya, multipolaritas sudah mulai terlihat dalam aspek ekonomi dengan kehadiran Cina dan Jepang yang mengalami pertumbuhan ekonomi yang sangat pesat (Wardhani, n.d.).

Perubahan sistem internasional multipolar yang ditandai dengan munculnya kekuatan-kekuatan baru tentunya mempengaruhi politik luar negeri Indonesia. Atas dasar ini munculah pertanyaan apakah Pancasila masih menjadi acuan dalam politik luar negeri bebas aktif yang memungkinkan Indonesia bertindak fleksibel dalam berhubungan dengan kekuatan-kekuatan besar sekaligus tetap aktif dalam memelihara perdamaian dunia. Selain itu, bagaimana peran Pancasila sebagai landasan politik luar negeri Indonesia dalam mengamankan kepentingannya tanpa terikat kepada salah satu pihak. Dari pertanyaan tersebut, penelitian ini akan berfokus terhadap analisis peran Pancasila dalam memandu politik luar negeri Indonesia di tengah sistem internasional multipolar.

## **METODE**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif untuk menjelaskan peran Pancasila dalam memandu politik luar negeri Indonesia di tengah sistem

multipolar. Metode kualitatif muncul dari ide yang dituangkan ke dalam pertanyaan penelitian yang nantinya akan menentukan teknik pengumpulan dan analisis data. Menurut McCusker & Gunaydin (2015), metode kualitatif bertujuan untuk menjawab pertanyaan tentang “apa (what)”, “bagaimana (how)”, atau “mengapa (why)” atas suatu fenomena. Metode ini menekankan penggunaan kalimat deskriptif dan naratif untuk memberikan gambaran atau penjelasan atas suatu peristiwa dengan lebih komprehensif. Metode ini juga sangat memperhatikan proses dan makna terjadinya suatu peristiwa sehingga tidak hanya memberikan jawaban dari suatu permasalahan, tetapi juga pemahaman mendalam terhadap substansi dari proses

## **KERANGKA PEMIKIRAN**

### **Pancasila Sebagai Dasar Negara Indonesia**

Pancasila sebagai dasar negara Indonesia lahir melalui proses yang panjang dan sarat akan gagasan terbaik para pendiri bangsa. Pancasila disahkan sebagai dasar negara pada sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) tanggal 18 Agustus 1945. Sebelum disahkan sebagai dasar negara, terdapat tiga usulan dasar negara yang disampaikan oleh tiga tokoh bangsa, yakni Soepomo, Moh. Yamin, dan Soekarno yang dibacakan pada saat sidang perumusan dasar negara oleh Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) tanggal 29 Mei-1 Juni 1945. Moh. Yamin mengusulkan lima prinsip yang menekankan persatuan

jawaban atas suatu permasalahan tersebut (Basri, 2014).

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi pustaka dengan mengambil data dari internet, yang meliputi website resmi pemerintah Indonesia, penelitian terdahulu, buku, berita, dan artikel jurnal terakreditasi. Kemudian data ini dianalisis menggunakan metode deskriptif untuk menerangkan bagaimana sesuatu bisa terjadi dengan mengumpulkan fakta-fakta secara sistematis. Teknik analisis ini akan membantu dalam menjelaskan bagaimana Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara berperan dalam berjalannya politik luar negeri Indonesia dalam sistem multipolar dengan menekankan pada alasan dan substansi yang komprehensif.

dan keadilan sosial dengan berlandaskan ketuhanan. Sedangkan Soepomo juga mengusulkan lima prinsip yang menekankan persatuan dalam keberagaman yang dibarengi semangat kekeluargaan. Kemudian pada tanggal 1 Juni 1945, Soekarno mengusulkan lima prinsip yang menekankan nasionalisme dengan semangat gotong royong dan religiusitas (Nurdiaman, 2007). Lima prinsip dari Soekarno ini diberi nama Pancasila yang berasal dari bahasa Sansekerta, yaitu panca yang berarti lima dan sila yang berarti prinsip atau asas. Pancasila yang dicetuskan oleh Soekarno kemudian diperbaiki dan diperbaharui oleh Panitia Sembilan sehingga menjadi Pancasila seperti yang kita kenal hingga saat ini.

Pancasila terdiri dari lima prinsip atau asas yang memuat jati diri bangsa Indonesia. Kelima sila tersebut mengandung nilai-nilai fundamental

untuk menunjang kapabilitas negara dalam menjalankan kebijakannya, termasuk politik luar negeri (Abdurofiq. et al., 2024). Politik luar negeri adalah serangkaian kebijakan, sikap, dan langkah pemerintah Indonesia dalam melakukan hubungan dengan negara lain, organisasi internasional, dan subjek hukum internasional lainnya dalam rangka mengatasi isu internasional untuk mencapai tujuan nasional. Politik luar negeri Indonesia didasarkan pada Pancasila, UUD 1945, dan Garis-Garis Besar Haluan Negara yang dilaksanakan melalui diplomasi aktif, kreatif, dan antisipatif serta teguh dalam pendirian dan rasional dalam pendekatan (UU Nomor 37, 1999). Kelima sila dalam Pancasila menjadi landasan penyelenggaraan politik luar negeri sesuai dengan nilai-nilai fundamental pada masing-masing sila. Sila pertama (Ketuhanan), politik luar negeri harus dapat berkontribusi terhadap kebaikan dunia dan tidak menimbulkan kerusakan; Sila kedua (Kemanusiaan), politik luar negeri harus mendukung hak dan kebebasan manusia sebagai makhluk individu sekaligus mendorong hubungan kekeluargaan dengan manusia lain sebagai makhluk sosial; Sila ketiga (Persatuan), politik luar negeri harus mengedepankan persatuan dalam mencapai kepentingan bersama dan mengatasi isu global; Sila keempat (Permasyarakatan), politik luar negeri harus mengedepankan dialog dan musyawarah dalam setiap perjanjian kerja sama dan penanganan konflik. Sila kelima (Keadilan), politik luar negeri harus memperhatikan kesetaraan dan

keadilan setiap negara dalam setiap kerja sama dan forum internasional. Nilai-nilai fundamental Pancasila tersebut juga mempengaruhi politik luar negeri Indonesia yang menganut prinsip bebas aktif. Politik luar negeri bebas aktif yang dianut Indonesia merupakan salah satu bentuk operasional nilai-nilai Pancasila di kancah global. Praktik politik luar negeri bebas aktif memberikan keleluasaan bagi Indonesia dalam bertindak dan bersikap terhadap aktor internasional lain asalkan kepentingan nasionalnya tercapai. Selain itu juga mendorong Indonesia untuk terlibat dalam upaya mengatasi isu internasional dan menjaga ketertiban dunia. Politik bebas aktif yang dilakukan Indonesia hingga sekarang ini berorientasi pada nilai kemerdekaan, perdamaian, kemanusiaan, dan keadilan, seperti yang tersirat dalam Pancasila. Atas kebijakan politik bebas aktif yang dilakukan Indonesia tersebut, menjadikan Indonesia sebagai pemain baru dalam politik global dan menjadi negara yang diperhitungkan oleh komunitas internasional.

### **Multipolaritas Sistem Internasional**

Sejak diakuinya negara sebagai aktor resmi dalam hubungan internasional, kondisi atau situasi internasional telah mengalami berbagai perubahan yang membentuk suatu Polarisasi. Polarisasi adalah jumlah kekuatan besar dalam hubungan internasional yang mempengaruhi hubungan antar negara-negara (Keersmaeker, 2017: 232). Polarisasi atau jumlah kekuatan besar ini biasanya ditandai oleh suatu peristiwa besar sebagai dampak dari

interaksi antar kekuatan besar tersebut.

Pada abad ke-20 awal hingga pertengahan, terdapat dua peristiwa besar yang menandai polarisasi sistem internasional menjadi multipolar (lebih dari dua kekuatan besar), yaitu Perang Dunia I dan II. Pada era tersebut terdapat beberapa negara kuat yang mendominasi sistem internasional, yaitu Britania Raya yang memiliki pengaruh di berbagai belahan dunia dengan kolonialisasinya, Prancis yang memiliki pengaruh kuat di Eropa lewat kekuatan politiknya, Rusia yang menguasai Eropa Timur dan sebagian Asia, dan Jerman dengan kekuatan militer terkuat di zamannya (McDougall, 2024). Selain itu, muncul juga Amerika Serikat dan Jepang sebagai kekuatan baru dengan modernitas ekonomi dan militernya yang cukup diperhitungkan (Suherman, 2004: 201-210).

Pada abad ke-20 pertengahan sampai akhir, tepatnya saat perang dingin, terjadi perubahan polarisasi dari multipolar menjadi bipolar (dua kekuatan besar). Amerika Serikat dan Uni Soviet menjadi dua kekuatan utama dalam hubungan internasional pada era ini dan membagi dunia menjadi dua blok, Blok Barat dan Blok Timur (Wagner, 1993). Amerika Serikat dengan Kapitalisme dan Uni Soviet dengan Komunismenya saling bersaing menyebarkan pengaruhnya melalui perlombaan teknologi, politik, ekonomi, dan militer. Meskipun tidak ada konfrontasi langsung antar dua negara ini, persaingan keduanya menambah ketegangan yang menyebabkan eskalasi konflik di berbagai belahan dunia. Selain itu, pada perang dingin

juga muncul perlombaan senjata nuklir yang saat itu mulai menjadi indikator baru dalam mengukur kekuatan suatu negara (Wayman, 1984).

Memasuki abad ke-21, polarisasi sistem internasional terus mengalami perubahan. Sebelumnya, pasca kekalahan Uni Soviet dan Blok Timur di Perang Dingin, Amerika Serikat menjadi kekuatan tunggal yang menjadikan sistem internasional menjadi Unipolar pada saat itu. Hal ini karena sebagai kekuatan tunggal, Amerika Serikat bebas melakukan manuver politik dan intervensi dalam urusan domestik negara lain (Debusman, 2008). Namun, dominasi Amerika Serikat mulai menurun setelah munculnya kekuatan-kekuatan baru, yaitu Cina, Jepang, India, dan Rusia yang mengubah sistem internasional dari unipolar menjadi multipolar. Meskipun dalam kekuatan militer, Amerika Serikat masih menjadi yang utama, kekuatan-kekuatan baru tersebut muncul dengan kekuatan ekonomi yang mampu bersaing dengan Amerika Serikat (Wayman, 1984). Di Asia Timur, pengaruh Cina dan Jepang semakin besar dengan perkembangan ekonomi dan teknologi yang mereka miliki. Di Asia Selatan, perkembangan India di bidang teknologi informasi dan farmasi semakin cepat didukung dengan bonus demografi. Selain itu, Indonesia mulai mengepakkan perannya di lingkup global dengan mendorong kerja sama negara-negara di kawasan melalui sentralitas ASEAN dan memperkuat kolaborasi dunia ketiga melalui forum dan organisasi internasional.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### **Pancasila Sebagai Landasan Politik Luar Negeri Indonesia dalam Multipolaritas Dunia**

Pancasila merupakan landasan dari setiap sikap dan tindakan yang diambil pemerintah untuk mencapai tujuan nasional. Sebagai landasan fundamental, Pancasila juga berfungsi sebagai panduan Indonesia dalam pelaksanaan politik dan hubungan luar negeri. Hal ini tercantum dalam UU No. 37 Tahun 1999, yang menyatakan bahwa perjuangan mencapai kepentingan nasional dan perlindungan warga negara Indonesia di luar negeri dilakukan melalui politik luar negeri yang dilandasi oleh penjabaran dari nilai-nilai Pancasila, UUD 1945, dan Garis Besar Haluan Negara (Kemenkeu, 1999). Selain itu, Pancasila sebagai landasan politik luar negeri Indonesia juga pernah disampaikan oleh Mohammad Hatta, "Pancasila merupakan satu faktor objektif yang berpengaruh atas politik luar negeri Republik Indonesia, karena sebagai falsafah negara, Pancasila mengikat seluruh bangsa Indonesia" (Mahruz, 1993).

Dalam melaksanakan politik luar negerinya, Indonesia menerapkan politik luar negeri bebas aktif. Prinsip bebas aktif merupakan penjabaran lebih lanjut dari nilai-nilai Pancasila. Nilai-nilai fundamental Pancasila yang mengedepankan kemerdekaan, perdamaian, kemanusiaan, dan keadilan mendukung komitmen bebas aktif Indonesia di kancah internasional. Prinsip bebas aktif yang dilandasi nilai-nilai Pancasila mendorong Indonesia untuk tidak mengikatkan diri kepada salah satu

pihak dan leluasa dalam bersikap dan bertindak pada suatu isu internasional. Selain itu, prinsip ini mendorong Indonesia untuk terus berkomitmen menjadi negara yang aktif dalam memperjuangkan perdamaian dan ketertiban dunia, sekaligus mengatasi isu-isu lintas batas dengan mengedepankan kepentingan nasional (Mahruz, 1993). Pancasila masih menjadi landasan politik luar negeri Indonesia di tengah multipolaritas sistem internasional. Dengan munculnya kekuatan baru yang mencakup berbagai bidang, politik luar negeri Indonesia harus mampu beradaptasi dengan peluang dan tantangan yang ada agar dapat menjadi pemain utama dalam mengatasi isu global dan menjaga perdamaian dunia. Politik luar negeri bebas aktif harus mampu mendukung perdamaian dan kemerdekaan dunia yang adil dan inklusif sesuai yang diamanatkan Pancasila. Berikut implementasi politik luar negeri bebas aktif Indonesia yang didasari oleh Pancasila di tengah sistem internasional multipolar.

#### **A. Mempromosikan Perdamaian Dunia**

*United Nations Peacekeeping Operations* (UNPO) atau Misi Pemeliharaan Perdamaian (MPP) PBB adalah salah satu instrumen PBB dalam menjaga dan memelihara perdamaian dunia. UNPO dikoordinasikan dibawah *United Nations Department of Peace Operations* (UNDPO) sebagai wadah pasukan perdamaian yang dikirim oleh negaranya untuk melaksanakan suatu misi yang berkaitan dengan perdamaian dan keamanan. Mulai beroperasi sejak 1948, UNPO telah

terlibat dalam mengatasi dan meredam konflik di berbagai negara di belahan dunia. Berdasarkan data dari UNDPD per Mei 2024, terdapat lebih dari 62 ribu personel dari 119 negara yang terdiri dari unsur militer, polisi, maupun sipil yang telah beroperasi di 21 MPP. Pada periode 2024, total anggaran pendanaan untuk MPP PBB sebesar 5,6 miliar dolar (UNDPD, 2024).

Pada era perang dingin, dimana kekuatan dunia masih berpusat pada dua kubu kekuatan (bipolar), fungsi MPP hanya terbatas untuk memelihara gencatan senjata dan menjaga stabilitas di lapangan untuk memberi ruang bagi usaha diplomatis dalam menyelesaikan konflik. Seiring berakhirnya perang dingin dan mulainya transformasi sistem internasional menjadi multipolar, peran dan fungsi MPP berubah dari misi “tradisional” yang berfokus pada militer menjadi misi “multidimensional” yang berfokus pada banyak aspek. Perubahan ini berpengaruh juga terhadap komposisi personel dimana keterlibatan polisi dan sipil semakin banyak dalam rangka mengupayakan perjanjian damai secara komprehensif dan membangun dasar-dasar terciptanya perdamaian berkelanjutan. Selain itu, bentuk dari konflik yang dihadapi MPP juga mengalami perubahan dari yang sebelumnya hanya berfokus pada konflik antar negara, sekarang ini juga harus mampu menangani konflik internal, perang saudara, radikalisme, terorisme, dan penyakit menular yang mengancam keberlangsungan hidup manusia.

Dari 199 negara yang berpartisipasi dalam MPP, Indonesia merupakan negara yang paling aktif

berkontribusi. Komitmen aktif Indonesia dalam misi-misi perdamaian merupakan perwujudan dari nilai Pancasila yang tertuang dalam pembukaan UUD 1945 alinea IV yaitu ikut melaksanakan ketertiban dunia dengan berdasar pada kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Per Juni 2024, terdapat 2.715 personel Indonesia atau Kontingen Garuda (KONGA) yang terdiri dari 183 personel perempuan dan 2532 personel laki-laki yang sedang bertugas dalam MPP, membuat Indonesia berada di posisi ke-7 dari 119 negara. Personel Indonesia ini diterjunkan di delapan MPP PBB, yaitu Lebanon, Afrika Tengah, Kongo, Sahara Barat, Sudan Selatan, Sudan, Siprus, dan Somalia. Tidak hanya dari segi personel, kontribusi Indonesia dalam MPP juga disalurkan melalui penggunaan peralatan dan akomodasi. Beberapa produk buatan Indonesia digunakan dalam MPP seperti Pengangkut Personel Lapis Baja ANOA, Kendaraan taktis KOMODO, dan senjata api SS dari PT. Pindad. Tidak hanya itu, Garuda Indonesia juga telah digunakan sebagai maskapai untuk mengirim pasukan MPP Indonesia ke wilayah misi sejak 2023 (Kemlu, 2024).

Keterlibatan Indonesia dalam misi perdamaian telah dilakukan sejak lama dan mencakup beberapa kawasan. Di Asia Tenggara, Indonesia terlibat dalam berbagai upaya untuk mencapai perdamaian dan stabilitas regional. Pada perang Vietnam 1974-1975, Indonesia mengirim KONGA yang bertugas untuk menjalankan amanat *International Commission of Control and Supervision* (ICCS). KONGA bertugas melakukan

pengamatan dan pengawasan gencatan senjata dan perjanjian perdamaian dalam rangka pengakhiran perang serta pembangunan perdamaian di Vietnam Selatan (Faqih & Liana, 2014). Indonesia juga berperan menjadi mediator dalam konflik sipil antara *Moro National Liberation Front* (MNLF) dan Pemerintah Filipina yang menghasilkan perjanjian perdamaian. Lalu pada konflik antara negara ASEAN dan Cina mengenai kedaulatan Laut Cina Selatan (LCS), Indonesia terus mendorong resolusi damai melalui negosiasi dan dialog dengan menyelenggarakan pertemuan ASEAN-Cina untuk menghasilkan jalan tengah yang tidak merugikan para pihak (Pradhana, et al., 2023). Misi perdamaian Indonesia sampai ke Timur Tengah, seperti ketika menjadi Dewan Keamanan tidak tetap PBB tahun 2007-2008, Indonesia banyak melakukan upaya-upaya untuk menyelesaikan isu-isu dan memperjuangkan perdamaian di Timur Tengah. Pada isu yang akhir-akhir ini sedang dibicarakan oleh komunitas internasional, yaitu isu Israel-Palestina, Indonesia terus mendorong hak-hak warga Palestina, yaitu dengan memperjuangkan kemerdekaan Palestina di forum internasional, memberikan bantuan kemanusiaan untuk para korban sipil, dan menuntut pelanggaran HAM yang dilakukan Israel di Mahkamah Internasional (Juntami, 2023). Upaya-upaya Indonesia dalam rangka mempromosikan perdamaian dunia merupakan cerminan dari nilai-nilai Pancasila. Nilai ke-2 tentang kemanusiaan tercermin dalam pengiriman pasukan perdamaian dan bantuan kemanusiaan untuk

menjamin hak asasi manusia. Bantuan kemanusiaan juga merupakan wujud implementasi dari sila ke-3, dimana bantuan tidak hanya berasal dari pemerintah, tetapi juga dari masyarakat Indonesia bersatu dan gotong royong dalam membantu negara yang terdampak konflik. Selain itu, resolusi konflik yang diupayakan Indonesia juga bentuk sila ke-4, dimana Indonesia mendorong terciptanya perjanjian perdamaian dalam forum diskusi dan dialog. Selain itu, di tengah sistem Multipolar, upaya aktif Indonesia dalam memelihara perdamaian dunia berdampak positif bagi kepentingan nasional Indonesia. Di lingkup internasional, partisipasi aktif Indonesia menunjukkan peran serta suatu negara dalam berkontribusi terhadap perdamaian dan keamanan dunia. Dalam lingkup nasional, keterlibatan aktif Indonesia dapat meningkatkan kapasitas individu dan instansi dalam hal keamanan dan humanitarian. Dari segi strategis dan ekonomis, kontribusi Indonesia dapat menjadi dorongan untuk perkembangan industri nasional di bidang pertahanan. Pencapaian kepentingan nasional tersebut menjadi dorongan untuk terus melangkah ke depan di tengah konstelasi Multipolaritas internasional.

### **B. Penghubung Negara Berkembang di Kanvas Internasional**

Indonesia saat ini telah menjadi negara yang diperhitungkan oleh komunitas dunia. Sebagai negara berkembang, Indonesia terus berupaya untuk bertransformasi

menjadi negara maju dengan berfokus pada peningkatan perekonomian dan pembangunan negaranya. Memiliki sumber daya melimpah baik dari segi SDM dan SDA, menjadi potensi yang besar bagi Indonesia untuk berupaya menjadi pusat pertumbuhan dan menjadi pemain utama dalam dinamika hubungan internasional. Ditambah dengan keuntungan demografis dan geopolitik, Indonesia berkomitmen untuk mendorong hubungan saling menguntungkan antar negara kawasan dengan lintas kawasan. Hal ini membuat Indonesia memegang peranan penting sebagai pemimpin negara-negara berkembang dalam mencapai kesejahteraan sekaligus tujuan bersama. Dengan situasi multipolar yang membuat dinamika hubungan internasional tidak dapat ditebak dan isu-isu semakin beragam, Indonesia diharapkan berperan lebih dalam mewujudkan ketertiban dan kesejahteraan dunia. Peran dan upaya Indonesia dalam mencapai tujuan tersebut diupayakan di lingkup internasional sebagai penghubung negara berkembang dengan subjek internasional lainnya. Komitmen ini dilakukan Indonesia melalui organisasi dan rezim internasional yang mawadahi kepentingan nasional negara berkembang.

### 1. Mengedepankan Sentralitas ASEAN

Kawasan Asia Tenggara merupakan kawasan yang strategis dan tengah menjadi target bagi perdagangan dan kerja sama multilateral. Hal ini tentunya menjadi peluang bagi negara-negara berkembang di kawasan untuk terus mendorong

pertumbuhan negaranya dengan memanfaatkan situasi yang ada. Indonesia sebagai negara berkembang yang memiliki populasi terbanyak dan luas wilayah terluas di kawasan mempunyai peran penting dalam meningkatkan sentralitas kawasan dan memajukan kepentingan bersama di kancah global. Sebagai salah satu dari lima pendiri ASEAN, Indonesia terus berkomitmen untuk mendukung sentralitas ASEAN dengan mendorong kerja sama dengan negara lintas kawasan (Abdurofiq, et al., 2024). Dalam menghubungkan ASEAN dengan subjek hukum internasional lain, Indonesia memiliki prinsip bahwa kerja sama harus dilakukan secara inklusif dan berkeadilan serta memprioritaskan stabilitas kawasan. Dengan kawasan yang stabil dari konflik dan ancaman, hubungan lintas kawasan akan semakin terbuka dan agenda regional untuk *Epicentrum of Growth* dapat terwujud.

Selain sebagai salah satu negara pendiri, Indonesia juga proaktif dalam pembuatan kebijakan dan strategi ASEAN. Indonesia menginisiasi terbentuknya *ASEAN Community*, yang terdiri dari *ASEAN Political Security Community* (APSC), *ASEAN Economic Community* (AEC), dan *ASEAN Socio-Cultural Community* (ASCC). Masing-masing komunitas kerja sama ASEAN ini bertujuan untuk memperkuat dan memajukan dimensi politik, keamanan, ekonomi, sosial, dan budaya (Kominfo, 2023). Dalam keketuaannya pada tahun 2023, Indonesia berkomitmen untuk terus mendorong peran sentral komunitas ASEAN dalam mengatasi isu-isu regional dan mewujudkan

kepentingan masing-masing anggota di berbagai bidang.

Selain *ASEAN Community*, Indonesia juga terlibat aktif dalam mendorong kerja sama *ASEAN Plus Three (APT)*. APT adalah mekanisme kerja sama ekonomi antara seluruh negara anggota ASEAN dengan tiga negara Asia Timur, yaitu Jepang, Cina, dan Korea Selatan. Mekanisme kerja sama ini memiliki tujuan utama untuk meningkatkan perdagangan, menumbuhkan iklim investasi yang menarik, dan memperkuat sistem pendanaan. Beberapa program telah terbentuk atas kerja sama ini, seperti *East Asia Free Trade Area* yang bertujuan untuk meningkatkan ekspor impor dengan menghilangkan hambatan tarif dan non-tarif, dan *ASEAN Plus Three Cooperation Fund (APTCF)* yang berfungsi sebagai mekanisme pendanaan dalam proyek-proyek kerja sama pembangunan berkelanjutan (Kemlu, n.d.)

Peran Indonesia sebagai penghubung negara berkembang di Asia Tenggara menunjukkan komitmen Indonesia dalam mewujudkan pembangunan regional. Di tengah sistem internasional multipolar, negara-negara khususnya negara berkembang dan kurang berkembang dituntut untuk mampu mengikuti dan beradaptasi terhadap dinamika global yang semakin beragam. Tentunya negara berkembang dan kurang berkembang memerlukan sebuah wadah bersama untuk membantunya mencapai kepentingan nasional dan menjamin keberlangsungan hidup negaranya. Disinilah peran Indonesia menjadi esensial karena Indonesia melalui politik luar negerinya berkomitmen untuk menjadi penghubung negara berkembang

dengan dunia internasional untuk mengurangi kesenjangan sosial di kancah dunia. Hal ini sesuai dengan tujuan Pancasila untuk mewujudkan keadilan sosial yang inklusif dan berkelanjutan.

## 2. Mendorong Kerja Sama Selatan-Selatan dan Triangular

Dewasa ini, dinamika konstelasi global terjadi sangat cepat dan dinamis sehingga negara berkembang dituntut untuk dapat bersaing dalam sektor perekonomian dan pembangunan. Kondisi ini dipengaruhi oleh munculnya *new emerging countries*, seperti Brazil, Cina, India, dan Indonesia yang mengalami pertumbuhan ekonomi yang pesat pada tahun-tahun terakhir. Sebaliknya, negara maju cenderung mengalami pertumbuhan ekonomi yang lambat. Hal ini menyebabkan interdependensi antara negara maju dan berkembang semakin kuat yang mendorong kerja sama Selatan-Selatan dan Triangular (KSST).

Kerja sama Selatan-Selatan adalah kerja sama antara dua atau lebih negara berkembang yang meliputi berbagai bidang, yaitu politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pendidikan. Sedangkan kerja sama Triangular adalah kerja sama antara dua atau lebih negara berkembang ditambah negara maju sebagai pihak ketiga. KSST berfungsi sebagai wadah berbagi informasi, pengetahuan, dan pengalaman antara negara berkembang. Di tengah persaingan multipolar, KSST harus dapat mengakomodasi kepentingan dan kebutuhan negara berkembang yang semakin kompleks, tidak lagi hanya berfokus pada kerja sama

teknik di bidang spesifik (Abdurachman & Prakoso, 2017).

Indonesia sebagai *new emerging countries* telah aktif terlibat dalam KSST sejak Konferensi Asia-Afrika (KAA) pada tahun 1955. Konferensi ini menandai awal pergerakan negara dunia ketiga untuk mempercepat pembangunan melalui kerja sama internasional. Peran Indonesia di KSST semakin terlihat setelah transformasi menjadi negara dengan pendapatan menengah yang membuat Indonesia tidak lagi hanya sebagai negara reseptor, tetapi juga negara donor. Keterlibatan Indonesia di KSST tidak hanya bertujuan untuk membantu pembangunan negara kurang berkembang, tetapi juga sebagai sarana diplomasi politik dan ekonomi dengan membangun citra baik dan membuka pasar produk Indonesia seluas-luasnya. Hal ini sesuai dengan politik bebas aktif Indonesia yang memungkinkan Indonesia bebas dalam melakukan kerja sama dengan negara lain sekaligus aktif dalam pembangunan global.

Peran Indonesia dalam KSST semakin besar setelah masuk menjadi anggota G20. Dalam forum G20 Indonesia sering kali menyampaikan pandangan-pandangan negara berkembang terhadap berbagai isu yang menjadi fokus dunia internasional yang dapat mempengaruhi pertumbuhan pembangunan di negara berkembang. Indonesia juga menyampaikan bahwa negara berembang terbuka akan peningkatan kerja sama dengan meningkatkan kapasitas dan kapabilitas negaranya dalam hal teknis dan non-teknis yang dibutuhkan dalam mekanisme kerja

sama. Indonesia juga meyakinkan negara maju bahwa dalam pelaksanaan kerja sama, negara berkembang tidak hanya akan menjadi negara reseptor, tetapi juga berkontribusi sesuai dengan perannya masing-masing agar negara maju juga mendapat keuntungan sehingga kerja sama yang saling menguntungkan dapat tercapai. Melalui G20 dan GNB, Indonesia mendorong program *South-South facility Exchanges* dari *World Bank* sebagai mekanisme berbagi pengalaman untuk mencapai target tertentu yang hasilnya akan dijadikan patokan bagi negara anggota *World Bank*. Melalui program ini, Indonesia bersama Brazil dan Meksiko telah berkontribusi dalam membantu mengentaskan kemiskinan di Bolivia dengan memberi dana sebesar 77.200 dolar pada tahun 2009-2010 (The South-South Experience Exchange Facility, 2011, h. 8). Pada tahun 2012, Indonesia juga telah memberikan dana sebesar 1,5 juta dolar ke *World Bank* sebagai bentuk komitmen Indonesia untuk mendukung pembangunan di negara berkembang (World Bank Institute, 2012, h. 8). Hal ini juga menjadi dorongan bagi negara-negara berpendapatan menengah dan negara maju untuk turut berkontribusi dalam pembangunan global yang inklusif dan berkeadilan.

Peran Indonesia sebagai penghubung negara-negara berkembang di kancah internasional sesuai dengan nilai ke-5 Pancasila, yaitu keadilan sosial. Indonesia melalui politik luar negerinya berkomitmen untuk terlibat aktif dalam terwujudnya pembangunan global yang inklusif dan berkeadilan dengan mendorong

hubungan saling menguntungkan antara negara berkembang dan subjek internasional lain. Indonesia percaya bahwa setiap negara berhak tidak hanya dalam hal kemerdekaan saja, tetapi juga dalam hal pembangunan dan kesejahteraan sosial.

### **C. Mendukung *Sustainable Development Goals* (SDGs) Tujuan 10, 13, dan 17**

Sistem internasional multipolar membuat potensi konflik antar negara-negara semakin besar. Hal ini disebabkan karena banyak kekuatan bersaing untuk mencapai kepentingan pribadi yang cenderung mengabaikan kepentingan kolektif. Meskipun tidak ada persaingan antara dua kekuatan dominan yang menyebabkan konflik skala besar, persaingan banyak kekuatan membuat potensi konflik menjadi semakin sering terjadi dan merambah ke berbagai dimensi. Bentuk konflik juga semakin beragam yang kini tidak lagi didominasi oleh perang terbuka, tetapi meluas menyangkup berbagai bidang, seperti perang dagang, isu lingkungan, dan perbatasan. Namun, sistem internasional multipolar tidak serta merta hanya menimbulkan kehancuran dan kerugian. Dengan tidak adanya satu atau dua kekuatan dominan dan munculnya kekuatan-kekuatan baru, dapat menambah potensi kerja sama dan pembangunan yang inklusif serta berkelanjutan. Maka dari itu, negara-negara melalui PBB sepakat untuk membentuk suatu agenda bersama yang disebut *Sustainable Development Goals* (SDGs).

SDGs merupakan komitmen global untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang inklusif dan

berkeadilan yang dideklarasikan pada Sidang Umum PBB pada September 2015. SDGs memuat 17 tujuan yang akan dicapai pada tahun 2030 untuk mengatasi berbagai tantangan global yang tengah dihadapi dan mencapai kehidupan yang lebih baik bagi semua orang di planet bumi (SDGs Bappenas, n.d.). SDGs merupakan agenda global lanjutan dari *Millennium Development Goals* (MDGs) yang berakhir pada tahun 2015. Berbeda dengan MDGs, mekanisme kerja SDGs tidak membedakan antara negara “maju” dan “berkembang”, tetapi merupakan komitmen bersama seluruh negara di dunia (Nurhayati, 2017). Di tengah sistem multipolar, SDGs menjadi pegangan untuk mencapai tujuan bersama dalam merespon isu global yang semakin beragam dan mendorong kerja sama untuk meminimalisir persaingan antar negara.

Tujuan-tujuan SDGs membutuhkan upaya bersama dari negara-negara di seluruh dunia untuk mencapai pembangunan yang dapat dinikmati oleh semua pihak tanpa ada satupun yang tertinggal sesuai dengan prinsip *No One Left Behind*. Indonesia merupakan salah satu negara yang mendukung komitmen SDGs untuk mencapai kesejahteraan nasional dan mendorong pembangunan global. Dalam penerapannya, pada tahun 2016 Indonesia telah menyusun langkah-langkah yang diperlukan untuk mensukseskan SDGs, yaitu pemetaan antara tujuan dan target SDGs dengan prioritas pembangunan nasional; pemetaan ketersediaan data dan indikator SDGs pada setiap tujuan dan target; penyusunan definisi operasional untuk setiap indikator SDGs; penyusunan peraturan terkait

pelaksanaan SDGs; dan perencanaan aksi nasional dan daerah terkait dengan penerapan SDGs di Indonesia (BPS, 2016). Upaya Indonesia dalam mendukung terwujudnya tujuan-tujuan dalam SDGs merupakan salah satu penerapan politik luar negerinya yang berorientasi nilai-nilai Pancasila untuk mewujudkan pembangunan global yang dapat dirasakan oleh semua pihak. Diantara tujuan-tujuan dalam SDGs, terdapat tiga tujuan yang erat kaitannya dengan isu global yang membutuhkan kerja sama internasional. Ketiga tujuan tersebut yaitu Tujuan 10 (Reduced Inequalities), Tujuan 13 (Climate Action), dan Tujuan 17 (Partnership for the Goals). Tujuan-tujuan tersebut juga masuk kedalam prioritas tujuan SDGs Indonesia yang diupayakan melalui politik luar negeri.

### **1. Tujuan 10 (Reduce Inequalities)**

Tujuan 10 dalam SDGs berfokus tentang pengurangan kesenjangan dalam aspek politik, ekonomi, sosial, dan budaya pada semua pihak, terlepas dari usia, jenis kelamin, ras, etnis, kelas, agama, disabilitas, dan kesempatan, baik di dalam negeri maupun luar negeri. Hal ini dapat dilakukan dengan membuat kebijakan migrasi yang aman, tertib, dan lancar untuk memastikan pertumbuhan yang merata. Indonesia harus memfasilitasi pekerja migran dalam melakukan mobilisasi ke negara tujuan untuk menghindari biaya perekrutan yang tidak masuk akal. Selain itu Indonesia harus gencar berkoordinasi dengan negara tujuan untuk memudahkan perlindungan terhadap Tenaga Kerja Indonesia (TKI). Tujuan 10 juga

mendorong representasi dan suara negara berkembang dalam pengambilan keputusan di lembaga dan forum internasional. Hal ini sesuai piagam PBB Pasal 2 tentang persamaan kedaulatan dari setiap negara anggota termasuk menghormati hak suara setiap anggota PBB. Selain itu dalam segi ekonomi, Indonesia mendukung perlakuan khusus dalam hal nilai tarif impor dari negara kurang berkembang. Indonesia juga mendorong bantuan pendanaan baik berupa bantuan pembangunan resmi (ODA), investasi langsung, hibah, maupun pinjaman dengan syarat lunak kepada negara kurang berkembang, seperti negara-negara Afrika, negara pulau kecil, dan negara terkurung daratan (BPS, 2016, h. 159-171).

### **2. Tujuan 13 (Climate Action)**

Tujuan 13 dalam SDGs berfokus tentang tindakan dalam mengatasi perubahan iklim dan adaptasi terhadap dampaknya. Perubahan iklim sendiri mengacu pada perubahan jangka panjang dalam pola cuaca dan suhu bumi. Perubahan iklim utamanya disebabkan oleh kegiatan manusia yang menghasilkan Gas Rumah Kaca (GRK) yang membuat penipisan lapisan ozon dan memancarkan kembali radiasi matahari ke bumi (Hite & Seitz, 2021). Dampak dari perubahan iklim memang belum terlalu dirasakan pada saat ini, namun dalam kurun waktu 20 tahun kedepan akan dapat berakibat serius bagi kehidupan manusia jika tidak segera diatasi.

Indonesia sebagai pemilik hutan terluas ke-3 di dunia, proaktif dalam

upaya penanganan perubahan iklim yang ditunjukkan dengan keikutsertaannya dalam forum internasional tentang perubahan iklim dan melakukan kerja sama perlindungan lingkungan. Indonesia juga mendorong upaya penanganan perubahan iklim mulai dari tingkat tapak dengan meningkatkan pendidikan, kesadaran, kapasitas SDM, infrastruktur, dan kelembagaan yang juga dimasukkan ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2019-2024. Indonesia juga mendorong ketersediaan negara dalam mengkomunikasikan target pengurangan emisi GRK dan upaya penanganan kepada komunitas internasional melalui *United Nations Framework Convention on Climate Change* (UNFCCC). Selain itu, Indonesia juga mendorong pelaksanaan dana bantuan iklim atau *Green Climate Fund* (GCF) dari negara maju sebesar 100 miliar dolar per tahun pada tahun 2020 untuk membantu kebutuhan negara berkembang dalam mengatasi perubahan iklim dan dampaknya (BPS, 2016, h. 199-202).

### 3. Tujuan 17 (Partnership for The Goals)

Tujuan 17 dalam SDGs berfokus tentang kerja sama negara-negara di dunia untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan. Isu yang semakin beragam dan kompleks di tengah sistem internasional multipolar membuat kerja sama antar bangsa menjadi semakin esensial. Indonesia mendukung peningkatan kontribusi internasional untuk membangun kapasitas SDM dan infrastruktur di negara berkembang

dalam mencapai pelaksanaan SDGs sesuai rencana nasional. Kontribusi internasional dapat dilakukan melalui kerja sama Utara-Selatan, Selatan-Selatan, dan Triangular.

Indonesia termasuk negara yang aktif dalam pelaksanaan kerja sama Selatan-Selatan, contohnya ketika menjadi negara *pilot* di Asia untuk mendorong kerja sama regional di bidang pembangunan ekonomi lokal, tata pemerintah daerah, dan peningkatan akses pendidikan serta kesehatan. Semakin kuat kerja sama Selatan-Selatan, semakin kuat pula kemandirian, pembangunan, dan solidaritas antar negara berkembang sehingga mempunyai nilai tawar lebih saat berhubungan dengan negara maju (BPS, 2016, h. 255).

Selain kerja sama Selatan-Selatan, kemitraan global juga dapat dibangun dengan memperkuat sistem perdagangan multilateral. Di tengah multipolaritas dunia yang meningkatkan perdagangan multilateral, kemunculan pasar bebas seakan-akan tidak dapat dicegah. Maka Indonesia mendorong WTO untuk menciptakan sistem perdagangan internasional yang bersifat universal, adil, terbuka, dan berbasis aturan. Selain itu, Indonesia melakukan berbagai upaya untuk menurunkan hambatan perdagangan bebas, seperti tarif dan non-tarif untuk meningkatkan keunggulan komparatif produk nasional di pasar negara mitra (BPS, 2016, 256).

Terakhir tetapi tidak kalah penting, kemitraan global dapat jauh dikembangkan dengan melibatkan aktor non-pemerintah. Maka dari itu, Indonesia juga turut mendorong kerja sama antara pemerintah dan swasta dengan berbagi pengalaman dan

berbasis strategi yang sama. Kontribusi swasta sangat penting dalam pembangunan suatu negara, dimana swasta dapat menyediakan pendanaan, memastikan kualitas pembangunan, dan menciptakan iklim investasi yang sehat (BPS, 2016, h. 260).

*Sustainable Development Goals* merupakan salah satu bentuk komitmen global untuk mencapai kesejahteraan umat manusia di muka bumi ini. Indonesia yang sudah sejak lama ikut berkontribusi dalam perdamaian dan ketertiban dunia, mendukung penuh agenda global ini untuk mencapai pembangunan yang berkeadilan. Melalui politik luar negeri bebas aktif yang dilandasi nilai-nilai Pancasila, Indonesia mengerahkan kemampuan dan sumber daya dalam berhubungan dengan negara lain untuk mencapai tujuan dalam SDGs, khususnya tujuan 10 (Reduce Inequalities), 13 (Climate Action), dan 17 (Partnership for The Goals). Dengan mendorong tujuan-tujuan tersebut menunjukkan komitmen Indonesia terhadap nilai-nilai Pancasila, khususnya sila pertama, kedua, dan ketiga. Sila pertama melandasi setiap tindakan yang dilakukan suatu negara agar tidak merusak lingkungan sebagai bentuk ciptaannya; sila kedua, diwujudkan dengan melindungi hak dan kewajiban yang sama pada setiap negara dalam berdinamika di agenda global; sila ketiga, dengan mendorong kerja sama antar bangsa untuk mencapai tujuan bersama; dan sila kelima, menekankan bahwa pembangunan harus dapat dirasakan oleh semua pihak tanpa terkecuali.

## SIMPULAN

Pancasila sebagai dasar negara masih relevan dalam memandu politik luar negeri Indonesia di tengah sistem internasional multipolar. Dengan politik luar negeri bebas aktif berlandaskan Pancasila, Indonesia dapat merespon isu-isu internasional sesuai kepentingan nasionalnya tanpa terikat pada kekuatan manapun sekaligus tetap aktif dalam mewujudkan perdamaian dan ketertiban dunia. Hal ini terus diupayakan Indonesia dalam prioritas politik luar negerinya dengan berupaya mempromosikan perdamaian dunia, menghubungkan negara-negara berkembang dengan subjek hukum internasional lainnya, dan mendukung agenda global dalam *Sustainable Development Goals* (SDGs).

Dalam mempromosikan perdamaian dunia, Indonesia merupakan salah satu negara paling banyak berkontribusi dalam Misi Pemeliharaan Perdamaian (MPP). Indonesia berada di posisi ke-7 sebagai negara pengirim pasukan perdamaian terbanyak yang telah beroperasi di delapan titik lokasi, yaitu Lebanon, Afrika Tengah, Kongo, Sahara Barat, Sudan Selatan, Sudan, Siprus, dan Somalia. Pemerintah Indonesia dan Pasukan perdamaian Indonesia atau Kontingen Garuda (KONGA) telah menjalankan upaya-upaya perdamaian, seperti mengawasi berjalannya perjanjian gencatan senjata di Vietnam Selatan, mediator konflik sipil antara *Moro National Liberation Front* (MNLF) dan Pemerintah Filipina, mendorong dialog dan negosiasi dalam penyelesaian konflik Laut Cina Selatan (LCS), dan memperjuangkan

kemerdekaan serta hak-hak warga Palestina di forum internasional. Sebagai penghubung negara berkembang, Indonesia mengedepankan sentralitas ASEAN. Sentralitas ASEAN menjadi semakin penting di tengah konstelasi global saat ini, dimana Asia Tenggara menjadi kawasan strategis dalam pertumbuhan dan pembangunan ekonomi global. Maka dari itu, kapasitas dan kapabilitas ASEAN harus ditingkatkan untuk mampu bersaing dan memanfaatkan peluang yang ada. Dalam hal ini, Indonesia mendorong peran *ASEAN Community* dan *ASEAN Plus Three* untuk memperkuat kerja sama lintas sektor dan lintas kawasan.

Di tengah berlangsungnya agenda global SDGs, Indonesia terus berupaya mendukung terwujudnya tujuan-tujuan tersebut di kancah global, khususnya tujuan 10 (Reduce Inequalities), Tujuan 13 (Climate Action), dan Tujuan 17 (Partnership for The Goals). Pada tujuan 10, Indonesia berupaya mengurangi kesenjangan dalam semua aspek kehidupan. Dalam hal ini Indonesia membuat kebijakan migrasi yang aman dan tertib, memfasilitasi mobilisasi pekerja migran, dan mengurangi hambatan perdagangan bebas untuk mendorong kerja sama ekonomi yang saling menguntungkan. Dalam tujuan 13, Indonesia mendorong komitmen negara berkembang untuk bersama-sama menangani dampak perubahan iklim melalui dana bantuan *Green Climate Fund* (GCF) dari negara maju. Pada tujuan 17, Indonesia mendorong kerja sama Selatan-Selatan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, memperkuat

kapasitas SDM dan infrastruktur, serta pemerataan akses pendidikan dan kesehatan bagi negara berkembang. Selain itu, Indonesia mendorong keterlibatan swasta untuk menyediakan pendanaan, investasi, dan memastikan kualitas pembangunan.

Kontribusi Indonesia dalam mewujudkan kehidupan global yang aman dan sejahtera sejalan dengan politik luar negeri bebas aktif yang berlandaskan Pancasila. Di tengah sistem internasional multipolar, nilai-nilai Pancasila seperti Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Permasyarakatan, dan Keadilan menjadi landasan agenda politik luar negeri Indonesia dalam mempromosikan perdamaian dunia, menghubungkan negara-negara berkembang, dan mendukung SDGs. Nilai Ketuhanan membuat setiap sikap dan tindakan yang dilakukan Indonesia didasari oleh semangat keberlanjutan untuk menjaga keberlangsungan hidup di bumi. Nilai Kemanusiaan membuat politik luar negeri Indonesia berfokus untuk mendorong perlindungan hak setiap manusia melalui pemberian bantuan kemanusiaan dan mempromosikan perdamaian. Nilai Persatuan mendorong semangat Indonesia untuk melakukan kerja sama multilateral dalam mengatasi isu-isu internasional dan mencapai pembangunan global. Nilai Permasyarakatan memperkuat komitmen Indonesia untuk menyelesaikan suatu konflik internasional dengan dialog dan negosiasi. Nilai Keadilan memperkuat tekad Indonesia dalam mewujudkan pembangunan global

yang inklusif dan berkeadilan tanpa ada yang tertinggal.

Peluang sekaligus tantangan yang lebih beragam dan kompleks sebagai akibat dari munculnya banyak kekuatan dalam sistem multipolar, membuat esensi dasar negara menjadi semakin penting sebagai landasan dalam menentukan arah dan tindakan suatu negara. Pancasila sebagai dasar negara sekaligus ideologi bangsa Indonesia masih mampu menunjukkan tajinya dalam memandu politik luar negeri bebas aktif Indonesia di tengah multipolaritas dunia. Indonesia harus terus berpegang pada prinsip kemerdekaan, perdamaian, kemanusiaan, dan keadilan yang semuanya merupakan nilai fundamental dari Pancasila agar tidak kehilangan arah dalam menentukan sikap serta tetap sejalan dengan jati diri dan identitas bangsa.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Abdurofiq, et al. (2024). Indonesian Foreign Policy In Maintaining Multilateral Relations of ASEAN Members. *Adalah Buletin Hukum & Keadilan*. 8(1), pp. 1-22.
- Basri. (2014). *Metodologi Penelitian Sejarah*. Bandar Lampung: Restu Agun. pp. 27-56.
- BPS. (2016). *Potret Awal Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals) di Indonesia*. Diakses 7 Agustus dari <https://filantropi.or.id/pubs/uploads/files/3%20BPS%20Potret%20Awal%20TPB%20di%20Indonesia.pdf>.
- Hendra Wahyu Prabandani. 2022. Menelusuri Kedudukan Pancasila Sebagai Sumber dari Segala Sumber Hukum. *Iblam Law Review*, 2(1). pp. 158-180.
- Hite A. Kristen & Seitz L. John. (2021). *Global Issues: An Introduction*. (edisi keenam). New Jersey: John Wiley & Sons. pp. 204-205.
- Keersmaecker, D.G. (2016). *Polarity, Balance of Power and International Relations Theory*. Hampshire: Palgrave Macmillan Cham. pp. 49-150.
- Kemenkeu. (1999). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 1999 Tentang Hubungan Luar Negeri*. Diakses 24 Juli 2024 dari <https://jdih.kemenkeu.go.id/fulltext/1999/37TAHUN1999UUPenjel.htm>
- Kemlu. (n.d.). *ASEAN Plus Three*. Diakses 7 Agustus dari [https://www.kemlu.go.id/ptri-asean/id/pages/asean\\_plus\\_three/978/etc-menu](https://www.kemlu.go.id/ptri-asean/id/pages/asean_plus_three/978/etc-menu).
- Kemlu. (2024). *Indonesia dan Misi Pemeliharaan Perdamaian PBB*. Diakses 1 Agustus 2024 dari [https://kemlu.go.id/portal/id/read/91/halaman\\_list\\_lainnya/indonesia-dan-misi-pemeliharaan-perdamaian-pbb](https://kemlu.go.id/portal/id/read/91/halaman_list_lainnya/indonesia-dan-misi-pemeliharaan-perdamaian-pbb).
- Kominfo. (2023). *Menilik Pentingnya ASEAN Socio-Cultural Community dalam KTT ASEAN 2023*. Diakses 3 Agustus dari [https://asean2023.id/id/news/a-closer-look-at-the-importance-of-asean-socio-cultural-community-at-the-2023-asean-summit#:~:text=ASEAN%20Socio%2DCultural%20Community%20\(ASCC,manusia%20dar](https://asean2023.id/id/news/a-closer-look-at-the-importance-of-asean-socio-cultural-community-at-the-2023-asean-summit#:~:text=ASEAN%20Socio%2DCultural%20Community%20(ASCC,manusia%20dar)

- i%20kerja%20sama%20ASEA  
N.
- McDougall, A.W. (2024). *20th Century International Relations*. Diakses 1 Agustus 2024 dari <https://www.britannica-com.translate.goog/topic/20th-century-international-relations-2085155>.
- Munawaroh, N. (2023). *Pancasila sebagai Sumber Hukum Tertinggi di Indonesia*. Diakses 24 Juli 2024 dari <https://www.hukumonline.com/klinik/a/pancasila-sebagai-sumber-hukum-1t5cdbb96764783/>.
- Nurdiaman, Aa. (2007). *Pendidikan kewarganegaraan: kecakapan berbangsa dan bernegara*. Bandung: Pribumi Mekar. pp. 30-78.
- Pradhana A.M., Wahyudi B., Azhari Y., dan Widodo P. (2023). Implementasi Peran Serta Indonesia Dalam Perdamaian Dunia Dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. *Jurnal Kewarganegaraan*, 7(1), pp. 662-675.
- Rizal Sukma. (1995). *The Evolution of Indonesia's Foreign Policy: An Indonesian View*. 35(3), pp. 304-315.
- Rodee C.C. (1957). *Introduction to political science*. New York, McGraw-Hill. pp. 9-38.
- Shohib Masykur. (2023). *Indonesia di Tengah Dunia Multipolar*. Diakses 20 Juli 2024 dari [https://www.kompas.id/baca/opini/2023/07/21/indonesia-di-tengah-dunia-multipolar?open\\_from=Search\\_Result\\_Page](https://www.kompas.id/baca/opini/2023/07/21/indonesia-di-tengah-dunia-multipolar?open_from=Search_Result_Page).
- South-South Facility. 2011. *The South-South Experience Exchange Facility*. Diakses 27 Juli 2024 dari <https://www.southsouthfacility.org>.
- Suherman, Eman. (2004). Dinamika Masyarakat Jepang dari Masa Edo Sampai Pasca Perang Dunia II. *Humaniora*, 16(2). pp. 201-210.
- UNDPO. (2024). *Our Peacekeepers*. Diakses 27 Juli 2024 dari <https://peacekeeping.un.org/en/where-we-operate>.
- World Bank Institute. 2012. *Doing business di Indonesia*. Diakses 28 Juli 2024 dari <https://documents1.worldbank.org/curated/en/860901468048916202/pdf/681820WP00Box30AHASAO0DB120Indonesia.pdf>.
- Wardhani. (n.d.). The Concept of Polarity and Centres of Power in International Relations. *Jurnal Politik Indonesia*. 7(2), pp. 106-111.
- Yani, M.Y. (n.d.). Perspektif-perspektif Politik Luar Negeri: Teori Dan Praksis. *Pustaka Ilmiah Unpad*, pp. 1-16.

## TENTANG PENULIS

Sarjana Hubungan Internasional FISIP UPN “Veteran” Yogyakarta yang tertarik akan isu-isu internasional khususnya di bidang lingkungan hidup dan perubahan iklim. Berproses untuk menjadi warga negara yang berkontribusi terhadap pembangunan nasional.